



**PENETAPAN**

Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata, yang diajukan oleh :

**ABDUL MUTTOLIB BIN SOBIRIN** umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.01 RW. 02 Desa sadang Kecamatan Jatirogo kabupaten Tuban, , sebagai Pemohon I;

**LU'IN FAUZIA ROHMAH BINTI MISWAN** umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di , sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Dalam hal ini dikuasakan kepada KUSNUL CHATIMAH, SH yang beralamatkan di Jl. Mutiara I Perum Bukit Karang Kel. Karang Kec. Semanding kab. Tuban

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 03 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Nopember 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban – Jawa Timur ( Kutipan Akta Nikah Nomor: 525/18/XI/2006 ).
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah.

Penetapan, Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 1 dari 8 Hal.



3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri ( bakda dukhul ) dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban Kutipan Akta Nikah Nomor: 525/18/XI/2006, tertulis **nama Pemohon I : ABD. MUTTOLIB Bin SOBIRIN**, tetapi pada Dokumen Pemohon Iseperti, Akta Kelahiran, Ijasah Anak Pemohon yang Pertama tertulis **Nama Pemohon I : ABDUL MUTTOLIB**, sehingga perlu pembetulan ( menyesuaikan pada Ijasah Anak ).
5. Bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada Kutipan Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan Dokumen Pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar **Nama Pemohon I : ABDUL MUTTOLIB**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan **nama Pemohon I** pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon.
6. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Biodata tersebut untuk dijadikan alasan hukum ( kepastian hukum ) persyaratan mengurus Pemecahan, Perbaikan Kartu Keluarga, Pembuatan KTP baru Para Pemohon serta Akta Kelahiran anak ke dua Para Pemohon serta administrasi Kependudukan lainnya.
7. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini.
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan **Nama Pemohon I : ABD. MUTTOLIB Bin SOBIRIN**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 525/18/XI/2006, yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban **dirubah menjadi Nama Pemohon I : ABDUL MUTTOLIB Bin SOBIRIN**.

Penetapan, Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 2 dari 8 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban – Jawa Timur ;

4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Atau Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon Penetapan seadil – adilnya untuk **Para Pemohon**.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan dan didamoini kuasa hukumnya, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 525/18/XI/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, tanggal 15 November 2006, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 35230210058000003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 12 November 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 35231857065800003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, 12 November 2012., Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi surat Keterangan Nomor 400/93/414.419.09/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sadang Kecamatan Tuban kabupaten Tuban, tanggal 28 Februari 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah An. LABIBATUL ZULFAA BAARIZAH Nomor MI-06 1300255113, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nahdlotus sibyan Tanggal 12 Juni 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup.

Penetapan, Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 3 dari 8 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;

- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ABDUL MUTTOLIB Nomor 3067/DISP/1989, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban Tanggal 06 Juli 1989. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon I tersebut adalah bahwa Pemohon I pada tanggal 15 Nopember 2006 telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang perempuan bernama **LU'IN FAUZIA ROHMAH Binti MISWAN**, dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 525/18/XI/2006 tanggal 15 Nopember 2006, tertulis **nama Pemohon I : ABD. MUTTOLIB Bin SOBIRIN** tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran Pemohon I dan pada dokumen anak Para Pemohon yaitu Ijazah tertulis **Nama Pemohon I : ABDUL MUTTOLIB**, sehingga

Penetapan, Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 4 dari 8 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perbedaan, perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : “Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta **Nama Pemohon I : ABDUL MUTTOLIB;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2. P.3.P.4.P.5. dan P.6.) haruslah menjadi rujukan, sehingga harus dianggap benar, **Nama Pemohon I : ABDUL MUTTOLIB;**

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di

Penetapan, Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 5 dari 8 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 525/18/XI/2006, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007);

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan **Nama Pemohon I : ABD. MUTTOLIB Bin SOBIRIN**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 525/18/XI/2006, yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban **dirubah menjadi Nama Pemohon I : ABDUL MUTTOLIB Bin SOBIRIN.**
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

Penetapan, Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 6 dari 8 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 367.500.00,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.H.ASEP BADRUZAMAN.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. HAMDAN, SH.,MH dan Drs.H.IRWANDI,MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan 21 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN.,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. HAMDAN, SH.,MH

Drs.H.IRWANDI,MH

Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO,S.AG.SH

## Rincian Biaya Perkara :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses         | : Rp 51.500,00  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp 250.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi        | : Rp 10.000,00  |

Penetapan, Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 7 dari 8 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 367.500,00  
(tiga ratus enam puluh tujuh lima ratus rupiah)

Penetapan, Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 8 dari 8 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)